



**LEMBARAN KALURAHAN HARGOSARI KAPANEWON
TANJUNGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Hargosari)
Nomor : 10 Tahun : 2025**

PERATURAN KALURAHAN HARGOSARI
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH HARGOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 9* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 95 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial, Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 95);
15. Peraturan Desa Hargosari Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Hargosari Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Kalurahan Hargosari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Hargosari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 menjadi Tahun 2018-2026 (Lembaran Kalurahan Hargosari Tahun 2025 Nomor 2);
17. Peraturan Kalurahan Hargosari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Hargosari Tahun 2023 Nomor 4);
18. Peraturan Kalurahan Hargosari Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Hargosari Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN HARGOSARI
dan
LURAH HARGOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN HARGOSARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.545.229.300,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2.329.556.500,00</u>
<i>Surplus/Defisit</i>	<i>Rp 215.672.800,00</i>
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 78.327.200,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 294.000.000,00</u>
<i>Selisih Pembiayaan (a- b)</i>	<i>Rp. 215.672.800,00</i>
Surplus (defisit)	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan
ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKal;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya, jika Ada.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal;

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Hargosari.

Ditetapkan di : Hargosari
pada Tanggal : 30 Desember 2025
LURAH HARGOSARI

Ttd.

JUMENO

Diundangkan di : Hargosari
pada tanggal : 30 Desember 2025
CARIK KALURAHAN HARGOSARI

Ttd.

WAHYU EKA PRIHANTARA

LEMBARAN KALURAHAN HARGOSARI TAHUN 2025 NOMOR 10

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN HARGOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.441.229.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	29.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.545.229.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	909.983.826,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	864.668.274,00	
5.3.	Belanja Modal	432.104.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.329.556.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	215.672.800,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	78.327.200,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	78.327.200,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	294.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	59.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	235.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(215.672.800,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Hargosari, 30 December 2025

LURAH

ttd

JUMENO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN HARGOSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.441.229.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	29.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.545.229.300,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.315.986.300,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.070.947.300,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.474.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	49.474.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	737.983.550,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	737.983.550,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.468.496,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	50.468.496,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	74.038.494,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.038.494,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.052.000,00	ADD, PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.052.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	55.882.980,00	PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.882.980,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	30.350.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	21.000.000,00	PAD, PBH, PBP
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	
	1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.750.000,00	PBH
	1.2.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
	1.2.95	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.600.000,00	PBH
	1.2.95 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.212.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.250.000,00	DLL
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.440.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	3.500.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	8.022.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.022.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	192.641.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.855.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.855.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.450.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.700.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.400.000,00	PAD, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.240.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.700.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	103.996.000,00	PAD, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.996.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	8.830.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.830.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.010.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	11.010.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	34.460.000,00	ADD, DLL, PAD, F
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.460.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.836.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.400.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	3.436.000,00	PBH
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.436.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>742.248.400,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	35.700.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	29.100.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.100.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6.600.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	269.312.200,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.470.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.470.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	42.880.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.880.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	31.424.200,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.424.200,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.060.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.060.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	37.520.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.520.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	6.510.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.510.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	46.980.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.980.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	59.468.000,00	DDS, PBP
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.468.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	355.298.600,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	338.114.600,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	338.114.600,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	17.184.000,00	DDS
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	17.184.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	81.487.600,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	5.840.000,00	DDS
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.840.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	21.406.600,00	DDS
2.4.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.406.600,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	54.241.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.241.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	450.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	450.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>57.392.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.230.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	6.230.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.230.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.600.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	2.600.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	32.010.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	28.220.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	28.220.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.790.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.790.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.552.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	5.630.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.630.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.780.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.780.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	8.142.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.142.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>91.129.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	17.654.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	12.764.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.764.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	4.890.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.890.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.300.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.300.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.040.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	1.880.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.880.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	10.760.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.760.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.400.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	14.450.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	14.450.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.450.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.100.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.100.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	27.585.800,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	27.585.800,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	27.585.800,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>122.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	23.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	23.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	23.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	89.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	89.800.000,00	DDS, DLL
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	89.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.329.556.500,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	215.672.800,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	78.327.200,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	294.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(215.672.800,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Hargosari, 30 December 2025

LURAH

ttd

JUMENO